

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, serta dikembangkan oleh David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Dalam konteks penelitian ini, sektor pariwisata dapat dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut, seperti sumber daya alam (destinasi wisata), tenaga kerja (pelaku industri pariwisata), serta modal (infrastruktur dan fasilitas pendukung). Aktivitas pariwisata yang berkembang akan meningkatkan produktivitas ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pemanfaatan akomodasi, serta pertumbuhan usaha pendukung seperti restoran dan kawasan wisata, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mankiw, 2022; M. P. , & S. S. C. Todaro, 2020)

Selanjutnya menurut Michael P. Todaro, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas faktor produksi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia, kemajuan teknologi, dan kebijakan pembangunan yang efektif. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengelolaan sektor pariwisata yang optimal melalui

peningkatan kualitas layanan, pengembangan kawasan wisata, serta stabilitas ekonomi seperti pengendalian inflasi akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar, jumlah restoran, jumlah kawasan pariwisata, dan inflasi memiliki peran penting dalam memengaruhi PAD sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah (M. P. Todaro, 2006).

2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah kebijakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan, termasuk dalam hal pengumpulan pendapatan dan pengalokasian belanja daerah untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik di wilayahnya. Menurut Wallace E. Oates, desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih efisien karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat.

Selain itu, desentralisasi fiskal juga bertujuan meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya kewenangan fiskal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Halim,2020).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan , PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014*) Ketentuan ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Secara konseptual, PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Halim, 2004; Mardiasmo, 2018).

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki beberapa sumber utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

A. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah menjadi salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena memiliki potensi penerimaan yang besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, di mana pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan penerangan jalan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal (Mardiasmo, 2018).

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atau atas pemberian izin tertentu kepada individu maupun badan usaha. Berbeda dengan pajak, retribusi memberikan imbalan langsung

berupa layanan publik sehingga penerimaannya sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).

Secara umum retribusi daerah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, kebersihan, dan pasar; retribusi jasa usaha meliputi pemanfaatan kekayaan daerah, terminal, tempat rekreasi, dan rumah potong hewan; sedangkan retribusi perizinan tertentu meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin trayek, dan izin penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi daerah berkaitan erat dengan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah (Halim, 2004).

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan lainnya yang asetnya telah dipisahkan dari APBD. Penerimaan ini biasanya berupa laba atau dividen dari BUMD seperti perusahaan air minum daerah, bank pembangunan daerah, maupun perusahaan daerah lainnya.(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun tetap diakui secara hukum sebagai pendapatan daerah. Komponen ini meliputi hasil penjualan aset

daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, denda administrasi, tuntutan ganti rugi daerah, komisi, serta penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)

2.1.3.3 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

A. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat yang dilengkapi dengan pelayanan tambahan seperti makanan dan minuman, laundry, serta fasilitas pendukung lainnya. Subjek pajaknya adalah konsumen yang menggunakan jasa hotel, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel dengan tarif maksimal sekitar 10% dari jumlah pembayaran. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)

Pajak hotel merupakan instrumen penting dalam meningkatkan PAD sektor pariwisata karena berkaitan langsung dengan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian kamar. Semakin tinggi aktivitas perhotelan, semakin besar kontribusinya terhadap penerimaan daerah (Mardiasmo, 2018)

B. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pungutan atas pelayanan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, bar, katering, kantin, dan usaha sejenis. Subjek pajaknya adalah konsumen sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha

restoran dengan tarif maksimal sekitar 10% dari nilai transaksi.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)

Pajak restoran berkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan jumlah wisatawan akan meningkatkan konsumsi kuliner sehingga pajak restoran tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga mencerminkan perkembangan usaha kuliner dan UMKM daerah(Halim, 2004)

C. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pungutan atas penyelenggaraan hiburan berbayar seperti bioskop, konser, pameran, karaoke, diskotek, pertandingan olahraga, serta wahana permainan. Subjek pajaknya adalah penonton atau pengguna jasa hiburan sedangkan wajib pajaknya adalah penyelenggara hiburan dengan tarif yang ditetapkan melalui peraturan daerah.(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022)

Pajak hiburan memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri kreatif dan aktivitas pariwisata. Semakin banyak kegiatan rekreasi dan event yang diselenggarakan di suatu daerah, semakin besar kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan daerah (Mardiasmo, 2018)

2.1.4 *Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH)*

Teori Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata,

seperti bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatnya pengeluaran wisatawan, dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta berkembangnya berbagai sektor ekonomi terkait seperti transportasi, akomodasi, perdagangan, dan jasa lainnya. Aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata juga dapat menimbulkan efek berantai (*multiplier effect*) yang mendorong peningkatan produksi dan investasi di berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata sering dipandang sebagai salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar (Manuel Balaguer & Maria Cantavella-Jordá, 2002)

2.1.5 Ekonomi Pariwisata

Ekonomi pariwisata merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana kegiatan perjalanan wisata memengaruhi aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di suatu daerah. Pariwisata tidak sekadar aktivitas rekreasi, melainkan sektor ekonomi yang memiliki kemampuan menciptakan pendapatan, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan wilayah melalui efek pengganda (*multiplier effect*). Pengeluaran wisatawan Pada transportasi, penginapan, makanan dan minuman, serta hiburan akan menstimulasi perputaran ekonomi yang berdampak Pada berbagai sektor terkait (Spillane J. James, 1987)

2.1.5.1 Permintaan Pariwisata

Permintaan pariwisata merupakan keseluruhan keinginan dan kemampuan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi dalam periode tertentu. Menurut Alister Mathieson dan Geoffrey Wall (1982), permintaan pariwisata tidak hanya dilihat dari jumlah kunjungan yang benar-benar terjadi, tetapi juga mencakup potensi permintaan yang belum terealisasi. Mereka mengelompokkan permintaan pariwisata ke dalam tiga jenis utama, yaitu permintaan efektif, permintaan tertahan, dan tidak ada permintaan (Mathieson Alister & Wall Geoffrey, 1982).

A. Permintaan Efektif (*Effective Demand*)

Permintaan efektif adalah permintaan pariwisata yang benar-benar terealisasi dalam bentuk kunjungan wisata. Individu tidak hanya memiliki keinginan, tetapi juga kemampuan finansial dan waktu untuk melakukan perjalanan. Permintaan ini dapat diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, maupun pengeluaran wisatawan di destinasi (Mathieson Alister & Wall Geoffrey, 1982)

B. Permintaan Tertahan (*Suppressed Demand*)

Permintaan tertahan merupakan keinginan untuk melakukan perjalanan wisata yang belum terealisasi karena adanya hambatan tertentu, seperti keterbatasan pendapatan, akses transportasi yang kurang memadai, atau kondisi situasional seperti bencana dan ketidakstabilan politik. Jenis permintaan ini menunjukkan adanya potensi pasar yang dapat berkembang apabila hambatan tersebut dapat diatasi (Mathieson Alister & Wall Geoffrey, 1982)

C. Tidak Ada Permintaan (*No Demand*)

Tidak ada permintaan merujuk Pada kondisi ketika individu tidak memiliki minat untuk melakukan perjalanan wisata meskipun memiliki kemampuan finansial. Hal ini dapat dipengaruhi oleh preferensi pribadi, gaya hidup, atau kurangnya ketertarikan terhadap aktivitas wisata (Mathieson Alister & Wall Geoffrey, 1982)

2.1.5.2 Penawaran Pariwisata

Penawaran pariwisata merupakan keseluruhan sumber daya, fasilitas, dan layanan yang disediakan suatu destinasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. penawaran pariwisata adalah sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling terintegrasi, mulai dari daya tarik wisata, infrastruktur, fasilitas pelayanan, hingga lembaga pendukung yang bersama-sama menciptakan pengalaman wisata. Untuk menganalisis kesiapan destinasi, penawaran pariwisata sering dijelaskan melalui konsep 5A, sebagai berikut: (McIntosh Christie Robert et al., 1995)

1. *Attraction* (Atraksi)

Atraksi merupakan daya tarik utama yang menjadi alasan wisatawan berkunjung ke suatu destinasi. Atraksi dapat berupa sumber daya alam, budaya, maupun atraksi buatan seperti festival atau taman hiburan.

2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan wisatawan mencapai destinasi, termasuk ketersediaan transportasi serta kualitas infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah.

3. *Amenities* (Amenitas)

Amenitas adalah fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan wisatawan selama berada di destinasi, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya.

4. *Ancillary Services* (Layanan Pendukung)

Ancillary services mencakup lembaga atau organisasi yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti biro perjalanan, pemandu wisata, lembaga promosi, serta peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata.

5. *Accommodation* (Akomodasi)

Akomodasi merujuk pada fasilitas penginapan yang memungkinkan wisatawan tinggal sementara di destinasi, seperti hotel, homestay, villa, atau resort.

Kelima komponen tersebut menjadi dasar dalam menilai kapasitas dan kualitas penawaran suatu destinasi dalam memenuhi permintaan wisatawan (McIntosh Christie Robert et al., 1995)

2.1.6 Hubungan Antar Variabel

2.1.6.1 Hubungan Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Oktavianus (2020) Jumlah kunjungan wisatawan memiliki hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena semakin banyak wisatawan yang datang ke suatu daerah maka akan semakin besar potensi penerimaan daerah dari berbagai sumber seperti pajak hotel, restoran, retribusi objek wisata, serta aktivitas ekonomi lainnya. Maka dari itu kehadiran wisatawan mendorong perputaran ekonomi lokal yang pada akhirnya meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator penting dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata (Oktavianus Keo et al., 2020.; Liza Marie et al., 2020).

2.1.6.2 Hubungan Tingkat Hunian Kamar Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan penelitian Liza Marie (2020) Jumlah Tingkat Hunian Penginapan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah maka dari itu Tingkat hunian kamar hotel mencerminkan tingkat pemanfaatan fasilitas akomodasi oleh wisatawan, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan PAD melalui pajak hotel. Semakin tinggi tingkat hunian kamar, maka pendapatan hotel akan meningkat dan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Selain itu, tingginya hunian kamar juga menunjukkan daya tarik destinasi wisata yang mampu

menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama, sehingga memperbesar pengeluaran wisatawan di daerah tersebut (Liza Marie et al., 2020; Widiyanti, N et al., 2017).

2.1.6.3 Hubungan Jumlah Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah restoran dan rumah makan merupakan salah satu indikator perkembangan sektor pendukung pariwisata yang berkontribusi terhadap PAD melalui pajak restoran. Berdasarkan penelitian Widiyanti yang dilakukan di Yogyakarta Jumlah restoran, rumah makan dan kafe memiliki pengaruh positif yang signifikan. Maka dari itu semakin banyak restoran yang tersedia, maka semakin besar peluang wisatawan untuk melakukan konsumsi, sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah. Keberadaan restoran juga mencerminkan aktivitas ekonomi yang dinamis di suatu daerah wisata, yang secara tidak langsung memperkuat basis penerimaan daerah (Widiyanti & Dewanti. , 2017)

2.1.6.4 Hubungan Jumlah Kawasan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut penelitian Naning Widiyanti, Diah Setyawati Dewanti (2017) jumlah obyek wisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Maka dari itu jumlah kawasan pariwisata menunjukkan potensi dan kapasitas suatu daerah dalam menyediakan destinasi wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Semakin banyak kawasan pariwisata yang dikembangkan, maka semakin besar peluang peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti retribusi, pajak, dan usaha pendukung lainnya. Dengan demikian, pengembangan

kawasan pariwisata berperan penting dalam memperluas sumber-sumber penerimaan daerah dan meningkatkan PAD (Maria Yanti Akoit & Natalia Lily Babulu, 2021; Oktavianus Keo et al., 2020).

2.1.6.5 Hubungan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Inflasi memiliki hubungan yang kompleks terhadap PAD karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan wisatawan. Di satu sisi, inflasi dapat meningkatkan nominal penerimaan daerah dari pajak dan retribusi akibat kenaikan harga barang dan jasa. Namun di sisi lain, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli wisatawan sehingga berpotensi mengurangi aktivitas konsumsi di sektor pariwisata. Oleh karena itu, stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan daerah dari sektor pariwisata (Plzáková & Studnička, 2021; Yunie Theresia et al., 2024)

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait hubungan sektor pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam sektor pariwisata memiliki pengaruh yang beragam terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara simultan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap PAD, namun secara parsial hanya tingkat hunian hotel yang berpengaruh

signifikan (Andhalia Liza Marie & Rintis Eko Widodo, 2020). Sementara itu, penelitian lainnya di DIY mengenai pengaruh jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel, serta jumlah restoran dan rumah makan menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD sektor pariwisata, tetapi jumlah obyek wisata tidak berpengaruh signifikan (Widiyanti & Dewanti, 2017). Penelitian di Kabupaten Timor Tengah Utara mengungkapkan bahwa secara simultan jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, jumlah restoran/rumah makan, dan toko souvenir berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata, namun secara parsial tingkat hunian hotel tidak berpengaruh signifikan (Akoit & Babulu, 2021). Di Kabupaten Maros retribusi pariwisata dan penerimaan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, tetapi secara parsial hanya pajak restoran yang berpengaruh signifikan (Ahmad & Masdar, 2025). Berikut hasil studi terdahulu lainnya terkait faktor-faktor pariwisata yang memengaruhi PAD.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan, Metode dan Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dnengan penelitina
1	Oktavianus Keo, Yustina Paulina Penu, Yuliana Sedho (2020) “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ende”	mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan daerah dari sektor pariwisata.	Regresi linier berganda	Jumlah Wisatawan (+) <i>to</i> PAD, Tingkat Hunian Hotel (-) <i>to</i> PAD, Retribusi Obyek Wisata (+) <i>to</i> PAD.	Persamaan : Meneliti pengaruh sektor pariwisata terhadap PAD, Menggunakan variable jumlah kunjungan wisatawan dan Tingkat hunian hotel Perbedaan : hanya menggunkan variable pariwisata, Lokasi penelitian, Cakupan wilayah penelitian
2	Andhalia Liza Marie, Rintis Eko Widodo(2020) “Analisis Faktor Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Tingkat Penginapan Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata pada Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2007-2018”	Mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau asing dan tingkat penginapan Pada hotel terhadap penerimaan sektor PAD sub sektor pariwisata di Provinsi DIY periode 2007-2018.	Regresi berganda	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (+) tidak signifikan <i>to</i> PAD, Jumlah Tingkat Hunian Penginapan (+) signifikan <i>to</i> PAD.	Persamaan : Mengunakan varibael jumlah kunjungan wisatawan dan Tingkat hunian hotel,Menggunakan pendekatan kuantitatif time series. Perbedaan : Hanya berfokus Pada wisatwan mancanegara, Lokasi penelitian.
3	Widiyanti, N. & Dewanti, D. S. (2017) “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015.”	Mengetahui bagaimana pengaruh jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2015.	Kuantitatif, analisis data panel	PDRB (+) signifikan <i>to</i> PAD, Jumlah Hotel (+) signifikan <i>to</i> PAD, Jumlah restoran (+) signifikan <i>to</i> PAD, Jumlah Obyek Wisata (+) tidak signifikan <i>to</i> PAD.	Persamaan : Menggunakan variable jumlah restoran/rumah makan, menggunakan metode kuantittatif regresi Perbedaan : Terdapat PDRB Pada variable bebas, Wilayah penelitian

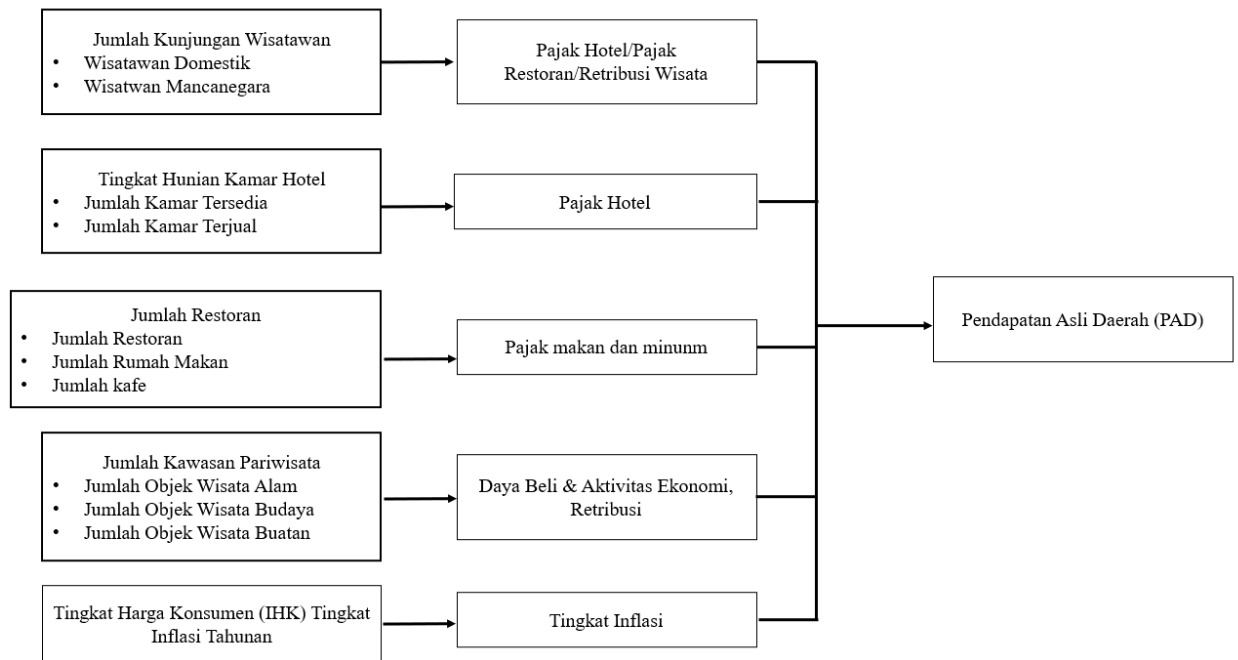
No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan, Metode dan Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dnengan penelitina
4	Maria Yanti Akoit, Natalia Lily Babulu (2021) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Timor Tengah Utara”	Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hunian hotel, jumlah restoran/rumah makan, dan jumlah toko souvenir terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten TTU dengan menggunakan data sekunder time series periode 2008–2018.	Regresi linier berganda	Jumlah Wisatawan (+) signifikan <i>to</i> PAD, Tingkat Hunian Hotel (+) tidak signifikan <i>to</i> PAD, Jumlah Restoran (+) signifikan <i>to</i> PAD, Jumlah Toko Souvenir (+) signifikan <i>to</i> PAD.	Persamaan : Menggunakan jumlah wisatawan, hunian hotel, dan jumlah restoran Pada variable bebas, menggunakan data time series Perbedaan : Adanya varibel took souvenir, Lokais penelitian, Tidak ada varibel makroekonomi
5	Fahma Addiina, Rizali (2024) “Analisis Kontribusi Pajak Penunjang Sektor Pariwisata di Kota Banjarmasin”	Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta pengaruhnya secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan asli daerah kota Banjarmasin	deskriptif kuantitatif.	Pajak Restoran (+) tidak signifikan <i>to</i> PAD, Pajak Hotel (+) signifikan <i>to</i> PAD, Pajak Hiburan (+) tidak signifikan <i>to</i> PAD, Pajak Parkir (+) tidak signifikan <i>to</i> PAD.	Persamaan : Meneliti pengaruh sektor pariwisata terhadap PAD, menggunakan metode kuantitatif dan regresi berganda Perbedaan : Fokus penelitian Pada pajak sektor pariwisata, lokasi penelitian.
6	Ahmad, Nisma Ariskha Masdar(2025) “Pengaruh Retribusi Pariwisata dan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”	Untuk mengetahui pengaruh retribusi pariwisata dan penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Maros secara parsial maupun simultan.	Metode kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif dan kausal.	Retribusi Pariwisata (+) tidak signifikan <i>to</i> PAD, Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata (+) <i>to</i> PAD.	Persamaan : Menggunakan variable penerimaan sektor pariwisata, Menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan : Focus pada sisi fiskal , lokasi penelitian berbeda.
7	Catur Martian Fajar, Indri Rahmat Tunisa (2025)	Mengevaluasi dan membandingkan perbedaan	kuantitatif melalui	Krisis kesehatan global (COVID-19) memberikan dampak penurunan	Persamaan :

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan, Metode dan Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dnengan penelitina
	“Perbandingan Penerimaan Pajak Pada Sektor Pariwisata Sebelum dan Sesudah Krisis Kesehatan Global”	signifikan dalam penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak hotel, restoran, dan hiburan sebelum dan sesudah terjadinya krisis kesehatan global.	metode perbandingan (comparative)	signifikan terhadap seluruh komponen pajak sektor pariwisata, terutama akibat pembatasan mobilitas, penurunan jumlah wisatawan, dan penutupan aktivitas ekonomi berbasis pariwisata.	Membahas sektor pariwisata dan penerimaan daerah, menggunakan pendekatan kuantitatif Perbedaan : Menggunakan metode komparatif, fokus pada dampak krisis kesehatan global.
8	Rina Mawarti Muji Astuti, Erwin Budi Setyawa(2025) “Kontribusi pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Klaten tahun 2020-2023”	Menganalisis kontribusi pajak sektor pariwisata terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Klaten Pada periode 2020–2023.	Deskriptif kuantitatif	Kontribusi pajak sector pariwisata terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten klaten rata-rata presentase kontribusinya 8%, dengan 92% lainnya kontribusi dari sumber pajak lainya seperti pajak penerangan jalan, PBB, BPHTB dan lainnya. Pajak Hotel (+) <i>to</i> PAD, Pajak Hiburan (+) <i>to</i> PAD.	Persamaan : Fokus pada peranan sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah, menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaan : Menggunakan analisis kontribusi, fokus Pada pajak sektor pariwisata, lokasi penelitian.
9	Naning Widiyanti, Diah Setyawati Dewanti (2017) “ Analisi Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makn, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 – 2025”	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan, terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata fi daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2015	kuantitatif.	Jumlah Obyek Wisata (+) signifikan <i>to</i> PAD Pariwisata, PDRB (+) signifikan <i>to</i> PAD Pariwisata, Jumlah Hotel (+) tidak signifikan, Jumlah Restoran dan Rumah Makan (+) Signifikan <i>to</i> PAD Pariwisata.	Persamaan : Menggunakan pendekatan kuantittatif dengan data sekunder dan metode analisis panel, Terdapat variabel sektor pariwisata : jumlah restoran dan rumah makan. Perbedaan : Lokasi penelitian, Periode penelitian, Variabel independen berbeda
10	Lucie Plzáková & Pavel Studnička (2021) Local Taxation of Tourism in the Context of the Collaborative Economy –	Untuk mengetahui factor factor yang mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari sektro pariwisata serta mengindetifikasi determinan	kuantitatif dan kualitatif	Jumlah Wisatawan (+) signifikan <i>to</i> pendapatan pemerintah daerah, Kapasitas Akomodasi (+) signifikan <i>to</i> pendapatan pemerintah daerah.	Persamaan : Meneliti determinan pendapatan daerah sektor pariwisata, menggunakan analisis kuantitatif dan data sekunder, terdapat

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan, Metode dan Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dnengan penelitina
	Case Study from the Czech Republic	utama penerimaan fiscal daerah berbasis aktivitas pariwisata.			variabel kunjungan wisatawan dan akomodasi Perbedaan : Dilakukan di lokal eropa, penelitian ini menekankan aspek kapasitas fiskal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan serta didukung oleh hasil penelitian terdahulu, sektor pariwisata memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai aktivitas ekonomi yang timbul dari kegiatan wisata. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan mendorong permintaan terhadap layanan pariwisata seperti penginapan, kuliner, dan objek wisata sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi wisata (Akoit & Babulu, 2021). Tingkat hunian kamar hotel yang tinggi juga mencerminkan meningkatnya penggunaan fasilitas akomodasi yang berpotensi menambah penerimaan pajak hotel (Liza Marie et al., 2020). Selain itu, bertambahnya jumlah restoran dapat mendorong aktivitas konsumsi wisatawan yang berkontribusi terhadap pajak restoran (Ahmad & Masdar, 2025). Keberadaan kawasan atau objek pariwisata yang semakin banyak juga dapat meningkatkan daya tarik daerah dan menarik lebih banyak wisatawan sehingga memperluas aktivitas ekonomi lokal, meskipun dalam beberapa penelitian variabel jumlah objek wisata tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap PAD (Widiyanti & Dewanti, 2017). Sementara itu, inflasi sebagai indikator ekonomi makro dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan wisatawan yang pada akhirnya berdampak pada tingkat konsumsi di sektor pariwisata. Dengan demikian, kelima variabel tersebut diduga memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian, dimana dugaan ini masih perlu diuji kembali. Berikut merupakan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

- 1 : Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Bandung Raya.
- 2 : Tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Bandung Raya.

- 3 : Jumlah restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Bandung Raya.
- 4 : Jumlah kawasan pariwisata berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Bandung Raya.
- 5 : Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Bandung Raya.